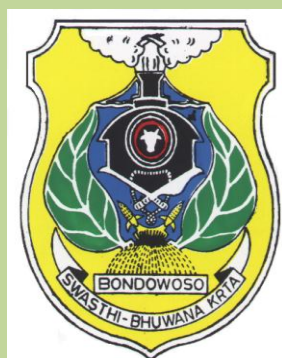


LAPORAN
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
2014
dalam rangka
Penyusunan LKPJ Bupati Bondowoso
Bondowoso, Januari 2015



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bondowoso
Jl. Letnan Amir Kusman No. 2 Telp. (0332) 423934

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang didalamnya mengatur kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada urusan Tata Ruang, Perencanaan Pembangunan, Statistik dan Penanaman Modal.

B. Gambaran Umum

Perencanaan adalah kegiatan – kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan metode yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan dapat juga berhubungan dengan pengeluaran atau belanja pemerintah serta penetapan sasaran – sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penetapan tahapan pembangunan baik nasional maupun daerah selalu diawali dengan proses perencanaan. Dari perencanaan akan dihasilkan produk perencanaan berupa kebijakan, rencana program dan rencana kegiatan baik lingkup makro maupun sektoral. Sedangkan unsur pembuat perencanaan pembangunan adalah institusi perencana. Pada tingkat nasional lebih dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan tingkat daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda merupakan institusi pemerintah yang membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan. Bappeda

mempunyai tugas yang sangat kompleks. **Pertama**, melaksanakan tugas pokok perencanaan yaitu menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan pembangunan. Seiring dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tambahan yang semula menjadi tupoksi SKPD lain yaitu urusan penanaman modal dan bidang penelitian dan pengembangan. Selaras dengan tupoksi yang baru, peranan Bappeda bertambah dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dapat digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. **Kedua**, melaksanakan tugas pengendalian yaitu melakukan pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan. **Ketiga**, melaksanakan tugas koordinasi yaitu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintah daerah serta instansi vertikal dan badan lain yang berada di pemerintah propinsi maupun pusat.

Sedangkan fungsi penyusunan perencanaan untuk anggaran dan belanja pemerintah maka Bappeda melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU - APBD) yang didalamnya memuat program/kegiatan pembangunan, capaian kinerja serta pagu anggaran. Kebijakan Umum ini selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bondowoso selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Hasil Perencanaan Pembangunan belum dapat mengakomodir secara maksimal aspirasi masyarakat dikarenakan kurangnya sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan sebagai akibat tidak adanya kepastian akan terealisasinya usulan kegiatannya.
3. Masih adanya inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan yang disusun.
4. Kurang optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan dikarenakan belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang handal dan terampil.

Keberadaan sumber daya juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso. Adapun beberapa sumber daya yang ada adalah :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II/b	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	11 Orang
5	Staf PNS/CPNS	24 Orang
6	Tenaga Kontrak	2 Orang
	Jumlah	43 Orang

Tabel 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang
2	Sarjana (S1)	28 Orang
3	Diploma	1 Orang
4	SLTA/SLTP/SD	9 Orang
	Jumlah	43 Orng

Tabel 3

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	30 Orang
3	Golongan II	5 Orang
4	Golongan I	1 Orang
5	Tenaga Kontrak	2 Orang
	Jumlah	43 Orang

BAB II

KEBIJAKAN SKPD

A. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan *visi* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah dan Terpadu Secara Berkelanjutan”

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah

Perencanaan pembangunan daerah yang terarah memiliki makna bahwa :

1. Perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menyelaraskan dengan kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar dapat memberikan arah bagi proses pelaksanaan pembangunan di daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol dan pengendali pelaksanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar komponen – komponen daerah sebagai penunjang pembangunan dapat dikembangkan secara optimal yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah disegala bidang.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu

Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu memiliki makna :

1. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan pendekatan top down dan bottom up system yaitu perencanaan pembangunan disusun dengan mengakomodir usulan dari bawah yaitu para stakeholder dan masyarakat melalui suatu mekanisme tertentu sedangkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya semaksimal mungkin menuangkannya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar semua sektor pembangunan yang akan dilaksanakan tidak saling tumpang tindih melainkan semua sektor pembangunan dapat saling melengkapi dan mendukung dalam satu kesatuan sistem pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan memiliki makna : Perencanaan pembangunan yang merupakan kesatuan rangkaian dengan tahapan perencanaan pembangunan sebelumnya dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut ditetapkan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun *misi* yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas
2. Melanjutkan terwujudnya Sistem Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat
3. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah:
4. Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal
5. Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu daerah yang dihadapi dengan rumusan sebagai berikut :

- a. merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan misi SKPD yang ingin dicapai.
- b. tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa akan datang.
- c. harus realistis dan dapat dicapai.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selamam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

- a. Spesifik yaitu sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas
- b. Dapat diukur yaitu sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur
- c. Dapat dicapai yaitu sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada
- d. Relevan yaitu sasaran mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
- e. Mempunyai batas waktu yaitu pencapaian sasaran ditetapkan
- f. Perbaikan berkelanjutan yaitu Sasaran dapat dicapai secara bertahap

Untuk mencapai misi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan sebagaimana **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MISI 1 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu	1.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan SKPD	Dokumen	8	7	7	7	8
			1.2. Terlaksananya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dengan Optimal	1.2.1 Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	6	6	6	7
2	MISI 2 : Melanjutkan terwujudnya Sistim Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat.	1. Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan .	1.1. Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Yang Akurat.	1.1.1. Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Yang Dapat Dijadikan Dasar Dalam Perencanaan Pembangunan	Dokumen	4	4	4	4	4
3	MISI 3 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1.1. Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas	1.1.1 Tersedianya Dokumen Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	Dokumen	1	1	1	1	1
			1.2. Terlaksananya pemetaan pemanfaatan ruang	1.2.1 Tersedianya dokumen pemetaan pemanfaatan ruang	Dokumen	0	1	1	1	1
			1.3. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan Optimal	1.3.1 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	Dokumen	1	1	1	1	1

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	MISI 4 : Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	1.1. Terlaksananya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal	1.1.1. Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan	Kali	1	1	1	1	1
				1.1.2.. Terselenggaranya promosi peluang investasi	Kali	0	1	1	1	1
				1.1.3. Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas	Milyar Rupiah	220	240	260	280	300
5	MISI 5 : Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1 Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Administrasi Dan Perkantoran. 1.2. Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perencana	1.1.1 Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kantor	Kegiatan	20	19	20	19	20
				1.2.1 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan Dan Keterampilan	Orang	1	1	1	1	1

B. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi pelayanan dengan prinsip-prinsip :

- Menterjemahkan strategi kedalam bentuk operasional
- Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategis jangka menengah
- Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi
- Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan
- Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, dimana kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, fokus, kongrit dan operasional
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dapat digambarkan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bondowoso sebagaimana **Tabel 2.2**

Tabel 2.2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

1	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
1.	MISI 1 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu	1.1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berjenjang dan Teritegrasi sesuai dengan Kemampuan Daerah dan Kebutuhan Masyarakat	1.1.1.1. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Telah Ditetapkan Dengan Optimal. 1.1.1.2 Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Efektif 1.1.1.3 Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur	1.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4.Program Perencanaan Sosial Budaya 5.Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam

			1.2 Terlaksananya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dengan Optimal.	1.2.1 Meningkatkan Koordinasi dan Pelaksanaan Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.1.1.4 Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Yang Sesuai dengan Perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.2.1.1 Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Berkala. 1.2.2.1 Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	6.Program Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
2	MISI 2 : Melanjutkan terwujudnya Sistim Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat.	1.1 Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan .	1.1.1 Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Yang Akurat.	1.1.1. Meningkatkan Koordinasi Dalam Perumusan Dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan	1.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi / Statistik Daerah Yang Berkualitas	1.Program Pengembangan Data Dan Informasi 2.ProgramPengembangan Data Dan Informasi /Statistik Daerah
3	MISI 3 Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1.1 Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas 1.2 Terlaksananya pemetaan pemanfaatan ruang 1.3 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan Optimal	1.1.1 Meningkatkan Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah 1.2.1. Meningkatkan Koordinasi dalam penyusunan dokumen pemetaan Pemanfaatan Ruang 1.3.1 Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang	1.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan Dokumen Penataan Ruang Wilayah 1.1.1.2 Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang 1.2.1.1 Melaksanakan pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. 1.3.1.1 Melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Secara Berkala	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4	MISI 4 : Melanjutkan terwujudnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	1.1. Terlaksananya Pelaksanaan SPM Penanaman Modal	1.1.1 Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM Penanaman Modal 1.2.1. Meningkatkan Koordinasi Antar Pelaku Penanaman Modal	1.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal 1.1.1.2 Menyediakan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.2.1.1 Melaksanakan Kerjasama antar Pelaku Penanaman Modal	1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah 3. Program . Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
5	MISI 5 : Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Administrasi Dan Perkantoran. 1.2. Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perencana.	1.1.1 Meningkatkan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perencanaan 1.2.1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	1.1.1.1 Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 1.2.1.1 Mengikutsertakan Aparatur Perencana Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Pendidikan Pelatihan bidang Perencanaan Pembangunan.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Formal

C. Prioritas SKPD

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda telah menetapkan indikator kinerja/tolok ukur sebagai alat ukur spesifik yang bersifat kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan. Setiap indikator kinerja akan dievaluasi dan dinilai dari pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Setiap program didukung dengan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan juga program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Rencana program dan kegiatan beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bondowoso yang didasari atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sedangkan Indikator Keluaran Program adalah merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program dan Kelompok sasaran adalah Pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan program SKPD.

Sebagai Badan yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan pembangunan maka prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda lebih mengarah pada peningkatan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah yang akan dicapai melalui program prioritas :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Pengembangan Data/ Informasi
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
10. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
13. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
14. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bappeda bukan merupakan lembaga penghasil yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan tetapi Bappeda sebagai institusi perencana yang didalamnya juga mengatur perencanaan anggaran termasuk pendapatan dan belanja sangat berkepentingan untuk mengetahui besaran pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten agar dapat melakukan estimasi terhadap penyusunan RKPD. Besaran pendapatan pemerintah kabupaten yang didapat dari berbagai sumber (DAU, DAK atau Tugas Pembantuan dan lain sebagainya) yang akan dijadikan acuan bagi pembiayaan program/ kegiatan pembangunan daerah.

B. Pengelolaan Belanja SKPD

1. Kebijakan Umum Keuangan SKPD

Selama tahun anggaran 2014, pengelolaan dan penggunaan belanja langsung SKPD lebih diarahkan kepada :

- a. Mengefisienkan dan mengefektifkan belanja barang dan jasa yang diprioritaskan untuk penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- b. Mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

2. Target dan Realisasi Belanja

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi pencairan keuangan sebesar Rp.9.253.377.762,- atau 93,68 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)

- a. Realisasi Fisik : 100 %
 b. Realisasi Keuangan : Rp. 2.205.293.256,- (98,61 %)

2. Belanja Langsung (65 Kegiatan) :

- a. Realisasi Fisik : 100 %
 b. Realisasi Pencairan Keuangan : Rp. 7.048.084.506,-

Sehingga sisa akhir tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.623.842.588,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 31.043.144,-
 2. Belanja Langsung : Rp. 592.799.444,-

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA KEGIATAN	BIAYA/ ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN s/d BULAN INI	KEMAJUAN		SISA ANGGARAN
				FISIK	KEUAN GAN	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung	2.236.336.400	2.205.293.256	100%	98,61%	31.043.144
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2.236.336.400	2.205.293.256	100%	98,61%	31.043.144
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.497.900	473.228.463	100%	96,68%	16.269.437

1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.000.000	64.405.663	100%	85,87%	10.594.337
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.200.000	19.200.000	100%	100%	-
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.350.000	21.350.000	100%	100%	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	35.982.500	35.937.500	100%	99,87%	45.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.149.900	43.099.900	100%	99,88%	50.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.037.500	7.035.000	100%	99,96%	2.500
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.015.000	4.015.000	100%	100%	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100%	100%	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	31.013.000	30.954.000	100%	99,81%	59.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.550.000	331.400	100%	97,78%	5.218.600
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	8.700.000	8.400.000	100%	96,55%	300.000
12	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat	7.500.000	7.500.000	100%	100%	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	862.650.000	845.345.365	100%	97,99%	17.304.635
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	131.750.000	130.519.000	100%	99,07%	1.231.000
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	306.050.000	291.340.000	100%	95,19%	14.710.000
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.500.000	5.500.000	100%	100%	-
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	113.147.000	112.839.365	100%	99,73%	307.635
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	11.475.000	11.475.000	100%	100%	-
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	294.728.000	293.672.000	100%	99,64%	1.056.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000	2.999.500	100%	99,98%	500

19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	2.999.500	100%	99,98%	500
	Program pengembangan data/informasi	300.000.000	219.568.900	100%	73,19%	80.431.100
20	Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka	175.000.000	99.897.000	100%	57,08%	75.103.000
21	Penyusunan Profil Kabupaten	75.000.000	71.471.900	100%	95,30%	3.528.100
22	Pengembangan Data Publikasi	50.000.000	48.200.000	100%	96,40%	1.800.000
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	341.035.550	326.044.650	100%	95,60%	14.990.900
23	Pemuktahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin	341.035.550	326.044.650	100%	95,60%	14.990.900
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	50.000.000	49.048.500	100%	98,10%	951.500
24	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	50.000.000	49.048.500	100%	98,10%	951.500
	Program Peningkatan Ilim Investasi dan Realisasi Investasi	335.000.000	310.208.500	100%	92,60%	24.791.500
25	Pengembangan Simpedal	35.000.000	35.000.000	100%	100%	-
26	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah	50.000.000	39.491.000	100%	78,98%	10.509.000
27	Penyusunan RUPM	250.000.000	235.717.500	100%	94,29%	14.282.500
	Program Perencanaan Tata Ruang	435.000.000	413.046.130	100%	94,95%	21.953.870
28	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	160.000.000	147.401.130	100%	92,13%	12.598.870
29	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	275.000.000	265.645.000	100%	96,60%	9.355.000
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200.000.000	197.085.500	100%	98,54%	2.914.500
30	Pengawasan pemanfaatan ruang	200.000.000	197.085.500	100%	98,54%	2.914.500

	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	100.000.000	99.178.500	100%	99,18%	821.500
31	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	100.000.000	99.178.500	100%	99,18%	821.500
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	220.107.000	159.507.325	100%	72,47%	60.599.675
32	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	69.087.000	54.118.000	100%	78,33%	14.969.000
33	Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	151.020.000	105.389.325	100%	69,79%	45.630.675
	Program perencanaan pembangunan daerah	1.519.000.000	1.378.871.897	100%	90,77%	140.128.103
34	Penyusunan rancangan RKPD	180.000.000	163.223.097	100%	90,68%	16.776.903
35	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	150.000.000	129.704.000	100%	86,47%	20.296.000
36	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000	93.187.700	100%	93,19%	6.812.300
37	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	150.000.000	137.946.450	100%	91,96%	12.053.550
38	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	137.500.000	114.245.700	100%	83,09%	23.254.300
39	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	92.500.000	87.660.500	100%	94,77%	4.839.500
40	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS	284.000.000	281.018.200	100%	98,95%	2.981.800
41	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD	50.000.000	49.549.750	100%	99,10%	450.250
42	Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD	200.000.000	193.171.500	100%	96,59%	6.828.500
43	Fasilitasi Monev RAD PPK	175.000.000	129.165.000	100%	73,81%	45.835.000
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	243.000.000	231.626.698	100%	95,32%	11.373.302
44	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	95.000.000	89.570.298	100%	94,28%	5.429.702
45	Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty)	98.000.000	95.943.000	100%	97,90%	2.057.000

	Program/APP)					
46	Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Monev Pembangunan Pangan dan Gizi	50.000.000	46.113.400	100%	92,23%	3.886.600
	Program perencanaan sosial dan budaya	917.257.500	865.182.920	100%	94,32%	52.074.580
47	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100.000.000	97.550.120	100%	97,55%	2.449.880
48	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	233.000.000	218.513.250	100%	93,78%	14.486.750
49	Pendukung Kegiatan USAID	67.000.000	61.536.650	100%	91,85%	5.463.350
50	Pendukung Kegiatan UNICEF	55.000.000	52.805.200	100%	96,01%	2.194.800
51	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	100.000.000	94.247.100	100%	94,25%	5.752.900
52	Tim Pembina Kabupaten Sehat	102.257.500	97.919.200	100%	95,76%	4.338.300
53	Pendamping Kegiatan Quick Wins	60.000.000	58.350.400	100%	97,25%	1.649.600
54	Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	100.000.000	91.966.500	100%	91,97%	8.033.500
55	Analisa Pengembangan SMK Berbasis Unit Produksi	100.000.000	92.294.500	100%	92,29%	7.705.500
	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	885.336.000	820.902.358	100%	92,72%	64.433.642
56	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100.000.000	98.403.840	100%	98,40%	1.596.160
57	Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP/Parallel	90.000.000	84.034.300	100%	93,37%	5.965.700
58	Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	250.000.000	236.033.000	100%	94,41%	13.967.000
59	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	145.000.000	129.673.900	100%	89,43%	15.326.100

60	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)	220.336.000	199.614.818	100%	90,60%	20.721.182
61	Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur	80.000.000	73.142.500	100%	91,43%	6.857.500
	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	740.000.000	656.239.300	100%	88,68%	83.760.700
62	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	60.000.000	40.321.500	100%	67,20%	19.678.500
63	Penerbitan Buletin Warta Litbang	40.000.000	38.155.000	100%	95,39%	1.845.000
64	Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM	150.000.000	146.955.000	100%	97,97%	3.045.000
65	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	490.000.000	430.807.800	100%	87,92%	59.192.200
	Jumlah Belanja Langsung	7.640.883.950	7.048.084.506	100%	92,24%	592.799.444
	JUMLAH SELURUHNYA	9.877.220.350	9.253.377.762	100%	93,68%	623.842.588

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum penyerapan anggaran yang dikelola oleh Bappeda berjalan sesuai rencana dengan realisasi penyerapan mencapai 93,68 %. Beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap secara maksimal lebih dikarenakan persoalan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti diantaranya :

- a. Dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan pada 4 (empat) kewenangan urusan wajib, maka dibutuhkan anggaran yang memadai agar perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada urusan wajib tersebut dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang menjadi hal yang harus terpenuhi untuk kelancaran pekerjaan walaupun dari sisi jumlah telah mencukupi akan tetapi banyak dari sarana yang ada mengalami gangguan yang diakibatkan dari usia dan frekuensi penggunaan yang berlebih. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor menjadi hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti : pengadaan dan pemeliharaan

komputer, printer, LCD, kendaraan dinas, mebeleur dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung.

- c. Meningingat permasalahan dan pelaksanaan pembangunan semakin berkembang karena kondisi yang terus berkembang pula, maka diharapkan perlunya Staf Bappeda mengikut Pelatihan - Pelatihan atau Bimbingan Teknis, baik itu dalam Perencanaan Pembangunan maupun bidang teknis lainnya

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Urusan Penataan Ruang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 lebih ditekankan pada proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kabupaten Bondowoso, yang merupakan rencana umum tata ruang daerah, dan akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail, serta acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk mewujudkan tata wilayah Kabupaten Bondowoso yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumberdaya alam. Guna mencapai sasaran tersebut, maka penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan melalui :

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Sasaran program ini adalah meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pembangunan dengan anggaran Rp. 435.000.000,- yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penetapan RDTRK, RTRK dan RTBL Rp. 160.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan legal drafting Raperda RDTRK Strategis Perkotaan Tamanan dan Maesan.
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dengan anggaran Rp. 275.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Maesan sebanyak 1 dokumen.

Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang

Tahun 2014

No	Indikator Program	Tahun 2014	
		Target	Realisasi
1	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketertiban pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang yang berlaku. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Pemanfaat Ruang dalam rangka mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan anggaran Rp.200.000.000,- digunakan untuk pembahasan rekomendasi pelaksanaan penataan ruang dan hasil kegiatannya dituangkan dalam laporan pengawasan pemanfaatan ruang secara berkala.

Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2014

No	Indikator Program	Tahun 2014	
		Target	Realisasi
1	Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Ruang secara Kontinyu	20 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan perundangan lainnya bahwa proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Setiap

pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan yang komprehensif dan dimonitoring melalui pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang kecamatan), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang kab), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang prov), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang hasilnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu sasaran perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang pada tahun 2014 diimplementasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.1.519.000.000,- diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rancangan RKPD dengan anggaran Rp.180.000.000,- digunakan untuk penyusunan 2 dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD tahun 2015 dan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 sebagai landasan perencanaan pembangunan.
- 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran Rp.150.000.000,- untuk menyerap aspirasi masyarakat digunakan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali.
- 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.100.000.000,- untuk penyusunan 1 dokumen LAKIP sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan.
- 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan anggaran Rp.150.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen LKPJ tahun 2013 sebanyak 1 dokumen sebagai bahan laporan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.137.500.000,- digunakan untuk monitoring

pelaksanaan pembangunan 4 kali di 23 kecamatan, penyusunan laporan dan pengendalian pelaksanaan APBD (DAU, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi yang menghasilkan 1 dokumen evaluasi pelaporan..

- 6) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK dengan anggaran Rp.95.000.000,- digunakan untuk pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang menghasilkan 1 dokumen evaluasi laporan..
- 7) Penyusunan Rancangan KU dan PPAS dengan anggaran Rp.284.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen KU APBD tahun 2015, dokumen KU Perubahan APBD tahun 2014 dan dokumen PPAS APBD tahun 2015, dokumen PPAS Perubahan APBD tahun 2014 sebagai landasan perencanaan pembangunan sebanyak 4 dokumen.
- 8) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk menyusun Dokumen Renstra Bappeda , Renja Bappeda Tahun 2015, DPA Tahun 2014, DPPA Tahun 2014, RKA Tahun 2015 dan RKA-P Tahun 2014, dan Bahan Rapat Kerja dengan DPRD Kabupaten Bondowoso, dengan total dokumen yang disusun sebanyak jumlah 12 Dokumen SKPD.
- 9) Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD sebesar Rp.200.000.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan Sosialisasi RPJMD Kabupaten Bondowoso di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Bondowoso.
- 10) Fasilitasi Monev RAD PPK sebesar Rp.175.000.000,- yang digunakan untuk menyusun laporan RAD PPK di Kabupaten Bondowoso setiap triwulan.

Keberhasilan program diukur melalui indikator sebagai berikut :

Indikator Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2014

No	Indikator Capaian Program	Tahun 2014	
		Target	Realisasi
1.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD	100% (8 Dokumen)	150% (12 Dokumen)
2.	Ketepatan waktu penyusunan LAKIP dan LKPJ	100%	100%

		(90 Hari)	(90 Hari)
3.	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	100% (4 Dokumen)	100% (4 Dokumen)
4.	Jumlah Dokumen RKPD, KU, PPAS yang disusun tepat waktu	100% (6 Dokumen)	100% (6 Dokumen)
5.	Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan	Ada	Ada
6.	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang telah Ditetapkan	Ada	Ada
7.	Tersedianya Dokumen RKPD tang Telah Ditetapkan	Ada	Ada
8.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{187}{203}$	$\frac{178}{203}$ (87,68%)

Pada tahun anggaran 2014, Bappeda Kabupaten Bondowoso ditargetkan 8 (delapan) dokumen perencanaan yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD dan realisasi sebanyak 12 (dua belas) Dokumen atau 150 % yang terdiri atas :

1. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2. Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2014
3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015
4. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014
5. Dokumen Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun 2015
6. Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015
7. Dokumen KU P APBD Tahun Anggaran 2014
8. Dokumen PPAS P APBD Tahun Anggaran 2014
9. Dokumen Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SD Alam
10. Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
11. Dokumen RAD Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
12. Dokumen Analisa Pengembangan SMK Berbasis Unit Produksi

Dokumen evaluasi yang dihasilkan Bappeda pada tahun 2014 sebanyak 4 (dokumen) dokumen atau 100 % sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 4 Dokumen yang meliputi :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013
3. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013
4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DAK Kabupaten Bondowoso

Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu merupakan dokumen-dokumen yang disusun sampai dengan proses pengesahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 yang terdiri atas : Dokumen RKPD Tahun 2015, Dokumen KU APBD Tahun 2015, Dokumen PPAS APBD Tahun 2015, Dokumen

Perubahan KU APBD Tahun 2014 dan Dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun 2014,

b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.243.000.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan anggaran Rp. 95.000.000,- digunakan untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi di kabupaten, provinsi, dan pusat.
- 2) Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP) dengan anggaran Rp.98.000.000,- digunakan untuk koordinasi dan mendukung penyelenggaraan program anti kemiskinan dari pemerintah provinsi.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pembangunan Pangan dan Gizi sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi daerah pembangunan pangan dan gizi.

Keberhasilan program diukur melalui indikator capaian program sebagai berikut :

**Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	% Masterplan Bidang Ekonomi Yang Digunakan Untuk Perencanaan	100 %	100 %
2	% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan bid.Ekonomi	100%	100%

c) Program Perencanaan Sosial Budaya

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp.917.257.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp.100.000.000,- digunakan untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya di kabupaten, provinsi, dan pusat.
- 2) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan anggaran Rp.233.000.000,- digunakan untuk memfasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar program penanggulangan kemiskinan dapat lebih terintegrasi.
- 3) Pendukung Kegiatan USAID dengan anggaran Rp.67.00.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan USAID sebagai bentuk dukungan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Kinerja USAID dalam rangka dalam peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan.
- 4) Pendukung Kegiatan UNICEF dengan anggaran Rp.55.000.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan UNICEF sebagai bentuk dukungan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan UNICEF dalam upaya peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan perlindungan anak.
- 5) Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan anggaran Rp.102.257.000,- digunakan untuk kegiatan fasilitasi Forum Bondowoso Sehat dan sosialisasi Kabupaten Sehat di 7 (tujuh) kecamatan terpilih sebagai lokasi kawasan/ tatanan yaitu Kecamatan Mesan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Sempol.
- 6) Pendamping Kegiatan Quick Wins dengan anggaran Rp.60.000.00,- digunakan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Quick Wins tahun 2014 yang berlokasi di Kecamatan Tlogosari sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dengan sumber dana dari APBN.
- 7) Rencana Aksi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan 1 dokumen Rencana Aksi Penurunan AKI dan AKB.
- 8) Analisis Pengembangan SMK Berbasis Produksi sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan 1 dokumen Analisis Pengembangan SMK Berbasisi Produksi.

Kinerja program ini yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

**Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	% Masterplan Bidang Sosial Budaya yang digunakan untuk perencanaan	100 %	100 %
2	% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.	100%	100%

d) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel, dengan anggaran Rp.885.336.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah dan SDA di kabupaten, provinsi, dan pusat.
- 2) Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dengan anggaran Rp.90.000.000,- yang digunakan untuk pendampingan dan pelaksanaan program WISMP dari pemerintah pusat, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi pelaksanaan program WISMP di Kabupaten Bondowoso dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat maupun provinsi.
- 3) Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Masterplan Transportasi) dengan anggaran Rp.250.000.000,- digunakan untuk menyusun 1 dokumen rencana induk pengelolaan transportasi sebagai salah satu acuan dalam kebijakan pengelolaan transportasi di Kabupaten Bondowoso.

- 4) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan anggaran Rp.145.000.000,- digunakan untuk koordinasi penyusunan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen.
- 5) Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2) dengan anggaran Rp.220.336.000,- digunakan untuk melaksanakan program WISMP 2 yaitu koordinasi dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa rapat-rapat komisi irigasi, sosialisasi penyadaran publik dan pengadaan tenaga pendamping (TPM).
- 6) Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur dengan anggaran Rp.80.000.000,- digunakan untuk kegiatan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur.

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tahun 2014

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	% Masterplan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang disusun	100 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)
2	% Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan	100 %	100 %
3	% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.	100%	100%

e. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel, dengan anggaran Rp.740.000.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran Rp. 60.000.000,- untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan di kabupaten, provinsi, dan pusat.
- 2) Penertiban Buletin Warta Litbang dengan anggaran Rp.40.000.000,- untuk kegiatan penyusunan Buletin Warta Litbang di Kabupaten Bondowoso dengan menyampaikan hasil-hasil kajian dalam bentuk buletin sebanyak 2 dokumen terbitan warta litbang.
- 3) Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM dengan anggaran Rp.150.000.000,- digunakan untuk kajian pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai rekomendasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk klaster tembakau, olahan tape, kuningin dan genteng.
- 4) Fasilitasi Dewan Riset Daerah dengan anggaran Rp.490.000.000,- digunakan untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dewan Riset Daerah yang meliputi survey, kunjungan kerja, dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memberi masukan untuk kebijakan Bupati Bondowoso. Selain itu juga digunakan untuk menyusun Agenda Riset Daerah, Kebijakan Strategis Daerah dan rekomendasi.

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	% Penelitian dan Pengembangan yang digunakan yang dilakukan	20 % (1 Dokumen)	100% (1 Dokumen)

f). Program Pengembangan Data/Informasi

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.300.000.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Penyusunan Profil Daerah dengan anggaran Rp.75.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan dan publikasi profil Bondowoso kepada masyarakat sebanyak 140 buku profil Kabupaten Bondowoso dan 180 buku saku profil Kabupaten Bondowoso.

- 2) Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka dengan alokasi anggaran Rp.175.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan Kabupaten Bondowoso dan masing – masing kecamatan sebanyak 230 buku Kecamatan dalam Angka dan 100 buku Kabupaten dalam Angka.
- 3) Pengembangan Data Publikasi dengan anggaran Rp.50.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan web site Bappeda dan pengembangan data berupa data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

**Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	% Jumlah Data/Informasi yang Siap Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	100% (2 Dokumen)	150% (3 Dokumen)

Pencapaian target Indikator program dapat terealisasi 150 % yaitu tersusunnya 3 dokumen berisi data dan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dihasilkan meliputi :

1. Dokumen Profil Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 (satu) Dokumen.
2. Dokumen Kabupaten Bondowoso Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka sebanyak 2 (dua) Dokumen

- e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.220.107.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :
- 1) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.69.087.000,- digunakan untuk Sosialisasi Penguatan BUMDes sebagai implementasi UU Desa yang diikuti Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan sek Kabupaten Bondowoso yang berjumlah 270 Orang Peserta

- 2) Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.151.000.000,- digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja Bupati Bondowoso ke 23 Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Januari – Pebruari 2014.

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi/ Bimbingan Teknis	120 Orang	270 Orang (225 %)

g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 3.000.000.-. Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sistematis dan terstruktur.

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Sistematis	2 Dokumen	2 Dokumen

h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 489.497.900,- Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien, efektif dan memadai, Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat

**Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% (13 Kegiatan)	93% (12 Kegiatan)

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 862.650.000,- Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

**Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	7 Kegiatan (100%)	6 Kegiatan (86%)

3. Urusan Statistik

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah dengan sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.341.035.550,- diimplementasikan dalam kegiatan :

1. Pemukhtahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin sebesar Rp. 341.035.550,- yang digunakan untuk penyusunan dokumen data terbaru masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso.

**Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1.	Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada
2	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada
3	% Data/Informasi yang Siap Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	100% (2 Dokumen)	50% (1 Dokumen)

1. Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dengan anggaran Rp.50.000.000,- digunakan untuk koordinasi penanaman modal di tingkat kabupaten dan provinsi.

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2014

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan	1 Kali	1 Kali
2	Terselenggaranya Promosi peluang Investasi	0 Kali	0 Kali

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.335.000.000,- diimplementasikan pada :

1. Pengembangan Sistem Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dipergunakan untuk pengembangan data-data penanaman modal dan peluang investasi di kabupaten bondowoso melalui website.
2. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT.Product Sari Alam – Jember dengan fasilitas penggunaan tanaman obat (bioparma) yang diikuti kelompok wanita tani dan lembaga LPPNU (60 Orang)
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso.

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Iklim Invesasi dan Realisasi Investasi

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Tersedianya Informasi peluang Usaha sektor/bidang usaha unggulan tiap tahun	1 Sektor (20 %)	1 Sektor (100%)
2	Jumlah Investasi Non Fasilitas	220/200 M	846/200 M (384 %)

- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasaran Daerah**
 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi dengan anggaran Rp.100.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen kajian potensi sub sektor pertanian (bambu) untuk memberikan informasi / peluang investasi kepada para investor

Pencapaian Indikator Kinerja

**Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Saranan dan Prasaran Daerah
 Tahun 2014**

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi yang tersusun	12,5 % (1 Kajian)	100 % (1 Kajian)

BAB V
P E N U T U P

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 pada umumnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2014 yaitu realisasi keuangan 93,68 % dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %.

Demikian Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 yang dapat disampaikan untuk mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso ke depan.

Bondowoso, Januari 2015

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

Ir.H.MOHAMMAD ERFAN,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 198603 1 013